RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : IPPKH PT Berau Coal

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ir Suhardi
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Berau Coal
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No 40 Tanjung Redeb, Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
d.	Lokasi IPPKH	:	Areal IPPKH PT Berau Coal SK Menteri Kehutanan No. SK.162/ Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011 di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
e.	Email	:	dedy.kustiono@beraucoal.co.id
f.	Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
g.	*Management Representatif*	:	Dedy Sulistiono, S.Hut

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 Januari 2019 kantor PT Berau Coal Jl. Pemuda No. 40 Tanjung Redeb	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21- 23 Januari 2019 Kantor dan Areal IPPKH PT Berau Coal	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	23 Januari 2019 kantor PT Berau Coal Jl. Pemuda No. 40 Tanjung Redeb	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 6 Februari 2019	a. PT Berau Coal dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IPKpkh sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 b. Status S-LK PT Berau Coal **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	M	PT Berau Coal memiliki izin IPK pada areal IPPKH No. SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011 dan terdapat peta IPPKH skala 1 : 25.000 serta lokasi pemanfaatan kayu berada di dalam areal IPPKH. PT Berau Coal memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/ SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000. PT Berau Coal memiliki dokumen legalitas perusahaan yang dah dan lengkap dengan susunan pengurus : Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Lokasi pemanfaatan kayu PT Berau Coal berada di dalam lokasi IPPKH sesuai peta lampiran SK IPPKH No. SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011. Koordinat hasil observasi lapangan sesuai yaitu N 02^0 18’ 02,2” ; E 117^0 23’ 23,3” dan N 02^0 18’ 26,7” ; E 117^0 23’ 33,7”
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

		usaha)		
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Dokumen rencana penebangan tahun 2018/2019 seluas ± 201 Ha telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai dengan surat No. 059/BC/LCC-YNP/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018. Luas areal yang dimanfaatkan sebesar ± 201 Ha dengan potensi sebesar 8.642,75 M3
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% seluas ± 201 Ha PT Berau Coal pada areal IPPKH SK 162/Menhut-II/2011 dengan jumlah pohon sebesar 18.566 Btg dan volume sebesar 8.642,75 M3 Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Berau Coal atas nama Satria Yudha Priyanto, MP. / No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/ 2017 berlaku s/d tanggal 08 September 2020 PT Berau Coal telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan hasil cruisingnya.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Ganis PHPL PKB penerbit LHP atas nama Dedy Kustiono, S.Hut Register Nomor : 00195-11/PKB-R/XX/2011, berlaku s/d 07 Maret 2020. LHP yang diterbitkan selama periode audit sebanyak 1.783 Btg volume 5.068,31 M3 sebagai berikut : No. 05 bln Agt. 2018 — 415 — 1,765.58 No. 07 bln Okt. 2018 — 28 — 116.24 No. 08 bln Nov. 2018 — 561 — 1,893.13 No. 09 bln Des. 2018 — 94 — 320.36 No. 10 bln Des. 2018 — 685 — 973.00 Terdapat stok kayu di TPK Hutan sebanyak 751 Btg volume 1.023,55 M3 dan di TPK

				Antara sebanyak 9 Btg volume 8.89 M3. Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Hutan diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan volume pengukuran sebesar 1,54 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat SPP SI PNBP atas LHP yang diterbitkan dengan jumlah sebagai berikut : Total PSDH = Rp 375.541.460,00 Total DR = US$ 79.415,77
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti NTPN yang benar sejumlah Total PSDH = Rp 375.541.460,00 Total DR = US$ 79.415,77
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan : - PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Berau Coal telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan DKB melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat SK TPK Hutan dan TPK Antara untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara sebagai berikut : - Dedy Kustiono, S.Hut. Reg. 02277-11/PKB-R/XX/2017 Surat penunjukkan No. 088/BC/LCC-YNP/VII/2018 - Farhan Soeprapto Reg. 02277-11/PKB-R/XX/2017Surat Penunjukkan No.

				090/BC/LCC-YNP/VII/2018. Penerbitan SKSHHK : - SKSHHK Industri No KB.B.4198491, tgl 27/10/18 Vol. 1.675,13 M3 tujuan TPTKB – PT Hutan Lestari Mukti Perkasa – Gresik - SKSHHK Industri No KB.B.4450520, tgl 28/12/18 Vol. 2.360,74 M3 tujuan TPTKB – PT Hutan Lestari Mukti Perkasa – Gresik - SKSHHK dilengkapi DKB sesuai ketentuan dan penandatangan dokumen sesuai
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Berau Coal telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan DKB melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Realisasi Penerbitan SKSHHK TPK Hutan menuju TPK Antara : - Oktober 2018 41 Set SKSHHK Vol. 1.765,58 M3 - Desember 2018 52 Set SKSHHK Vol. 2.279,18 M3 SKSHHK dilengkapi DKB sesuai ketentuan dan penandatangan dokumen sesuai
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Berau Coal telah memiliki sertifikat LK untuk ruang lingkup SK IPPKH No. SK.162/Menhut-II/2011 No. 361.SLK.010-IDN yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima karya. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Berau Coal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara telah menerapkan ketentuan K3 dengan ketat dan sesuai dengan ketentuan K3 Terdapat dokumen prosedur K3 di antaranya adalah Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden serta Pelanggaran Golden Rules Nomor Dokumen P-OHS-10, Edisi 2 Revisi 3 dan tanggal efektif 20 April 2016 dan Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Nomor Dokumen P-ERG-02, Edisi 1 Revisi 3 dan tanggal efektif 08 Agustus 2017 Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 yang lengkap dan sesuai dengan standar K3. Peralatan K3 PT Berau Coal tersedia cukup dan masih berfungsi dengan baik.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Berau Coal memiliki laporan kecelakaan kerja tahun 2018 dan menurut laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Dari daftar karyawan IPK PT Berau Coal diketahui bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama Aldo Surya Syachputra yang lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 1999 dengan jabatan sebagai Scaller Technician dan mulai bekerja pada tanggal 24 Oktober 2017 saat berusia 18

				tahun 9 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 13 Februari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur